

Judul : Risiko Fiskal Masih Ada
Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 17

Risiko Fiskal Masih Ada

Defisit Bisa Melebar dari 2,35 Persen Menjadi 2,55 Persen PDB

JAKARTA, KOMPAS – Kendati Kementerian Keuangan telah mengoreksi APBN Perubahan 2016, risiko tekanan terhadap fiskal masih ada. Risiko ini menyangkut jumlah uang tebusan dari program pengampunan pajak yang tetap ditargetkan Rp 165 triliun hingga akhir tahun ini.

"Kami akan memantau realisasi penerimaan, belanja, dan defisit anggaran. Kami membuat manuver di antara tiga hal itu saja. Instrumen mana yang akan dipakai, yang jelas APBN 2016 akan kita tutup dengan angka yang kredibel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada *Kompas*, di Jakarta, Kamis (18/8).

Kementerian Keuangan telah menyesuaikan APBN-P 2016. Penyesuaian itu mengacu pada penerimaan pendapatan negara yang diperkirakan meleset Rp 219 triliun dari target Rp 1.786,2 triliun. Pemerintah memotong

belanja anggaran Rp 96 triliun dari pagu Rp 2.082,9 triliun.

Dengan skenario tersebut, defisit diperkirakan melebar dari target 2,35 persen menjadi mendekati 2,55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, target uang tebusan dari program pengampunan pajak yang masuk dalam perhitungan penerimaan pajak tetap dipatok Rp 165 triliun. Artinya, jika realisasi uang tebusan di bawah target, fiskal kembali tertekan.

"Apabila target uang tebusan dan penerimaan reguler pajak tidak mencapai target, satu langkah sudah kita lakukan, yakni

mengurangi pagu belanja. Kita sudah menaikkan defisit dan kita masih punya 4,5 bulan (sampai akhir 2016). Nanti kita lihat saja," ujar Sri Mulyani.

Perihal uang tebusan program pengampunan pajak, Sri Mulyani menambahkan, pihaknya wajib mengusahakan pencapaian target tersebut. Ia berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan ketidaksiapan di lapangan. Sejauh ini, pemerintah akan melihat semua potensi yang ada dalam program pengampunan pajak itu.

"Saya akan terus melakukan usaha manajemen untuk memaksimalkan itu. Akan tetapi, di sisi lain, saya juga tahu kalau ada risiko. Saya sudah punya instrumen-instrumen, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun defisit yang akan saya pakai. Mana yang akan saya gunakan adalah yang paling sedikit membuat ekonomi kita menderita. Dan itu harus kita lakukan dalam empat

bulan ke depan. Sementara saya akan mendiskusikan dengan DPR," katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, realisasi penerimaan uang tebusan dari program pengampunan pajak masih sangat minim. Padahal, saat ini sudah memasuki pekan kedua Agustus.

Prastowo memperkirakan, realisasi uang tebusan pada akhir Desember 2016 akan di bawah target. "Dapat Rp 80 triliun saja sudah bagus," katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per Kamis (18/8) pukul 20.45, sebanyak 5.767 wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Total aset yang dilaporkan mencapai Rp 34 triliun. Jumlah itu terdiri dari deklarasi aset di dalam negeri Rp 28,7 triliun, deklarasi aset di luar negeri Rp 4,09 triliun, dan repatriasi Rp 1,2 tri-

liun. Adapun uang tebusan mencapai Rp 693 miliar atau 0,4 persen dari target.

Memacu pertumbuhan

Kekuatan pasar domestik sebagai pasar terbesar di ASEAN bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah perlu melindungi pasar dalam negeri dengan memerangi penyelundupan atau impor ilegal.

Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang Rachmat Gobel serta anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Benny Soetrisno, menyampaikan hal itu di Jakarta, kemarin.

"Konsumsi bisa tumbuh kalau orang punya daya beli atau bekerja. Orang bisa kerja kalau industri berjalan baik. Industri bisa tumbuh kalau pasar dalam negeri juga dijaga," kata Benny.

Pada Rancangan APBN 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. (LAS/FER)